

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Pollsi (Diskresi Kepolisian)*. Get. II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W, Norton and Company, 1984.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Arikha Cipta, 1995.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Get. II, Edisi I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ismangil, Wagino. *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*. Get. I. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1984.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Meleong, Levy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get. IV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*. Get. II, Keempat. Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Get. II. Semarang: Uni Diponegoro, 2004.
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1999.

Rianto, Bibit S. *Illegal Logging "Permasalahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia"*, dalam *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 061 Juli – September 2004, hlm. 19

Salim, H.S. *Dasar-Dasar Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Get. V. Jakarta: CV RajaGrafindo Persada, 2001.

Theo, OSC. Huijber. *Filsafat Ilmu Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982.

Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

\_\_\_\_\_. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

## B. TULISAN LAIN

Prasetyo, H.M. "*Problematika Penuntutan Perkara Penebangan Liar*", Makalah Seminar Pemberantasan Illegal Logging Melalui Penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

*Keadaan Hutan Indonesia* <http://www.fwi.or.id/iillegal%20logging/indeks.shtml>  
1] <http://www.putusan.com> diakses Kamis 20 Agustus 2008

Jaksa Agung: *Sebagian Besar Cukong Kayu Beralamat Fiktif*, Kompas 24 Februari 2005,  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0502/24/ekonomi/1579863.htm>, diakses 7/6/2007 8:18:58 PM

*Menumpas Penyelundup Kayu*, Kompas 19 November 2001,  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/ekonomi/menu15.htm>, diakses 7/6/2007.

*Menumpas Penyelundup Kayu*, Kompas 19 November 2001,  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/ekonomi/menu15.htm>, diakses 7/6/2007.

*Menumpas Penyelundup Kayu*, Kompas 19 November 2001,  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/ekonomi/menu15.htm>, diakses 7/6/2007.

*Menumpas Penyelundup Kayu*, Kompas 19 November 2001,  
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/ekonomi/menu15.htm>, diakses 7/6/2007.

APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), Illegal Logging Pengelolaan Hutan dan Permasalahannya, disampaikan sebagai bahan ceramah kepada mahasiswa PTIK, tgl. 25 April 2006 di Gd. Mutiara Djokosoetono, SH, Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan (KPK).
4. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (KSDAI Ili)
5. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 1995 tentang Penggunaan Gergaji Rantai.
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 1995 tentang Tindak Pengamanan Hutan Terpadu.
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
10. Instruksi Presiden Nomor. 5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.
11. Instruksi Presiden Nomor. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dikawasan hutan dan peredarannya

di wilayah RI.

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 493/Kpts-II/1998 tentang sanksi atas pelanggaran di bidang eksploitasi hutan.
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 316/Kpts-II/1999 tentang tata usaha hasil hutan.

